

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, beberapa kesimpulan dapat diambil sebagai berikut:

1. Opini audit tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa opini audit yang baik atau yang dinyatakan sebagai "Wajar Tanpa Pengecualian" (WTP) tidak menjamin kualitas kinerja keuangan pemerintah daerah yang baik. Selain itu, opini audit hanya menilai sejauh mana tata kelola keuangan pemerintah daerah terdokumentasi dalam laporan keuangan, tanpa memberikan pedoman terkait pengelolaan keuangan secara keseluruhan atau evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah.
2. Temuan audit BPK juga tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat. Hal ini mengindikasikan bahwa temuan audit yang terdapat dalam LKPD tidak mendorong pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan terhadap temuan tersebut guna meningkatkan kinerjanya. Lebih lanjut, pengukuran temuan audit berdasarkan jumlah temuan pada LKPD dianggap kurang sesuai karena pemerintah daerah lebih cenderung mempertimbangkan nilai materialitas daripada jumlahnya.
3. *Intergovernmental revenue* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat. Ini berarti semakin tinggi *intergovernmental revenue* yang diterima, semakin rendah kinerja keuangan pemerintah daerahnya. *Intergovernmental revenue* yang diterima oleh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah, terutama dalam hal efisiensi keuangan daerah.

4. Opini audit, temuan audit BPK, dan *intergovernmental revenue* memiliki pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah saran yang dapat diberikan oleh peneliti:

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan waktu pengamatan penelitian dan mempertimbangkan penggunaan rasio keuangan lainnya, seperti rasio kemandirian, efektivitas, dan pertumbuhan terhadap APBD sebagai alat evaluasi kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini diharapkan dapat memberikan hasil yang lebih akurat untuk mendukung perbaikan kinerja keuangan sektor publik.
2. Pemerintah daerah diharapkan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia di wilayahnya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendukung kegiatan pemerintahan dengan menggunakan PAD tersebut. Diperlukan kesadaran untuk tidak terlalu bergantung pada pemerintah pusat agar dapat mengembangkan potensi pendapatan asli daerah
3. BPK dan pemerintah pusat dapat memberikan dukungan dan pengawasan yang efektif terhadap pemerintah daerah, sehingga dapat membantu dan mendorong peningkatan kinerja keuangan mereka.